

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA TANGERANG SELATAN

Menurut Pengeluaran

2014 - 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANGERANG SELATAN**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA TANGERANG SELATAN

Menurut Pengeluaran

2014 - 2018



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA TANGERANG SELATAN
MENURUT PENGELUARAN
2014-2018**

ISBN : -

Nomor Publikasi : 36740.1903

Katalog BPS : 9302020.3674

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : x + 113

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Dicetak oleh :

CV. Palaris

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran, disusun sebagai salah satu perangkat data ekonomi untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah ataupun sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi di dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan. Pada publikasi tahun ini, merupakan kelanjutan tahun sebelumnya yaitu telah menggunakan tahun dasar 2010 serta menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Tim Penyusun dan semua pihak baik instansi/lembaga pemerintah maupun swasta yang telah berkontribusi dalam mewujudkan publikasi ini. Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, kami membutuhkan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan selanjutnya.

Semoga bermanfaat.

Tangerang Selatan, September 2019

Badan Pusat Statistik
Kota Tangerang Selatan
Kepala,



R. Achmad Widijanto, SSi, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Grafik.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	8
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	17
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	19
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	22
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	26
2.4. Pembentukan Modal Tetap (PMTB).....	29
2.5. Perubahan Inventori.....	34
2.6. Ekspor dan Impor Barang Serta Jasa.....	38
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA TANGERANG SELATAN MENURUT PDRB PENGELUARAN 2014-2018	41

3.1.	Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	43
3.2.	Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran.....	55
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA TANGERANG SELATAN 2014-2018	79
4.1.	Produk Domestik Regional Bruto (Nominal).....	81
4.2.	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap Ekspor.....	83
4.3.	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB.....	85
4.4.	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	87
4.5.	Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB.....	88
4.6.	Perbandingan PDRB Terhadap Total Impor.....	90
4.7.	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	91
4.8.	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>).....	93
4.9.	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	95
BAB V	PENUTUP	99
	LAMPIRAN.....	103
	DAFTAR PUSTAKA.....	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan, 2014-2018 45
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan, 2014-2018 47
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan, 2014 – 2018 50
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan, 2014 – 2018 .. 53
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan, 2014 - 2018 54
Tabel 6	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014-2018..... 55
Tabel 7	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Tangerang Selatan, 2014-2018..... 57
Tabel 8	Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Kota Tangerang Selatan..... 59
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan 2014-2018..... 60
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRK Kota Tangerang Selatan, Tahun 2014 – 2018 62
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2014 - 2018 64
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tangerang Selatan, 2014 – 2018 71
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Tangerang Selatan, Tahun 2014 – 2018 72
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Kota Tangerang Selatan 2014-2018..... 74

Tabel 15	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kota Tangerang Selatan, Tahun 2014 – 2018	77
Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Tangerang Selatan, 2014 – 2018	83
Tabel 17	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan 2014-2018.....	84
Tabel 18	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2014 – 2018	86
Tabel 19	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan, Tahun 2014 – 2018.....	88
Tabel 20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Kota Tangerang Selatan 2014 – 2018	89
Tabel 21	Rasio PDRB terhadap Impor Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 – 2018	90
Tabel 22	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Tangerang Selatan, 2014 – 2018	91
Tabel 23	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kota Tangerang Selatan, 2014 – 2018	94
Tabel 24	Incremental Capital Output Ratio Kota Tangerang Selatan, 2014 – 2018	96

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014-2018.....	46
Grafik 2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018	48
Grafik 3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014-2018	49
Grafik 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018	51
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 105
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 106
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 107
Lampiran 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan 108
Lampiran 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan 109
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan 110
Lampiran 7	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan 111
Lampiran 8	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan 112
Lampiran 9	Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan..... 113

I BAB I
PENDAHULUAN

<https://tangselkota.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima

pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah

konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlmasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

$$Y = C + \text{GFCF} + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>) Bruto	= Pembentukan Modal Tetap
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2013 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun

kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2013. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kota Tangerang Selatan menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2013 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2013 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2013 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2013, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2013

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2013 antara lain adalah:

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya

- eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2013.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2013

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2013
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://tangselkota.bps.go.id>

II BAB II
METODA ESTIMASI DAN SUMBER
DATA

<https://tangselkota.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

⁵ Untuk Kota Tangerang Selatan yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran

7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2013, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;

5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga

yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas;

belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;

3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari

unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kota Tangerang Selatan mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan; b). PK-P Kota Tangerang Selatan

yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kota Tangerang Selatan.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kota Tangerang Selatan tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P Kota Tangerang Selatan Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output -

Penjualan barang dan jasa +

Social transfer in kind purchased market production +

Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*)

menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS

- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ **Metoda Langsung:**

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2013=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply
Barang x Rasio

PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB
atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan

inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*),

- mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
 - d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
 - f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
 - h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian

BPS;

4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) - Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\begin{aligned} \text{PI atas dasar harga Konstan} &= \text{Inventori (t) atas dasar harga} \\ &\text{Berlaku/IHPB (t) -} \\ &\text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PI atas dasar harga Berlaku} &= \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-} \\ &\text{rata (t)} \end{aligned}$$

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/Kota Tangerang Selatan
- b. Import dari luar provinsi/Kota Tangerang Selatan.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kota Tangerang Selatan didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kota Tangerang Selatan diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://tangselkota.bps.go.id>

III BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA
TANGERANG SELATAN MENURUT PDRB
PENGELUARAN 2014 -2018

<https://tangselkota.bps.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2018 meningkat sebesar 50,25% dibanding tahun 2014, yakni dari 50.074,11 (Miliar Rupiah) menjadi 75.234,55 (Miliar Rupiah). Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2018 (2010=100), maka peningkatan lebih kecil, yakni dari menjadi 42.411,47 (Miliar Rupiah) tahun 2013 menjadi 55.938,71 (Miliar Rupiah) atau meningkat sebesar 31,90%.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Tangerang Selatan periode 2014 - 2018 dapat tetap tumbuh di atas 6%, yakni sebesar 8,05%; 7,25%; 6,74%; 7,31%; dan 7,37%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2018 disumbang oleh kategori Real Estate

yaitu 1,48 persen dari laju pertumbuhan ekonomi 7,37 persen. Dari sisi permintaan akhir, sumber pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan.

PDRB Pada periode tahun 2014 - 2018 Kota Tangerang Selatan atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 50 074,11 miliar Rupiah (2014); 56 237,40 miliar Rupiah (2015); 61 300,80 miliar Rupiah (2016); 67 943,56 miliar rupiah (2017) dan 75 234,55.miliar Rupiah (2018). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Tangerang Selatan pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018

Table 1. GRDP at current price by Expenditure, Tangerang Selatan Municipality 2014-2018

(Miliar Rp/Trillion Rp)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2014	2015	2013	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	39 288,84	42 341,14	45 963,98	49 887,80	55 016,28
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	112,22	124,70	135,40	145,00	159,26
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	911,82	983,69	1 073,85	1 156,73	1 474,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	20 268,32	22 558,17	24 642,68	29 287,90	31 392,57
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	1 159,11	516,28	30,21	37,22	57,40
6. Ekspor/ <i>Export</i>	32 644,70	32 630,99	32 812,94	30 193,57	33 439,91
7. Impor/ <i>Import</i>	44 310,89	42 917,57	43 358,27	42 764,66	46 304,95
PDRB / <i>GRDP</i>	50 074,11	56 237,40	61 300,80	67 943,56	75 234,55

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Tangerang Selatan pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018

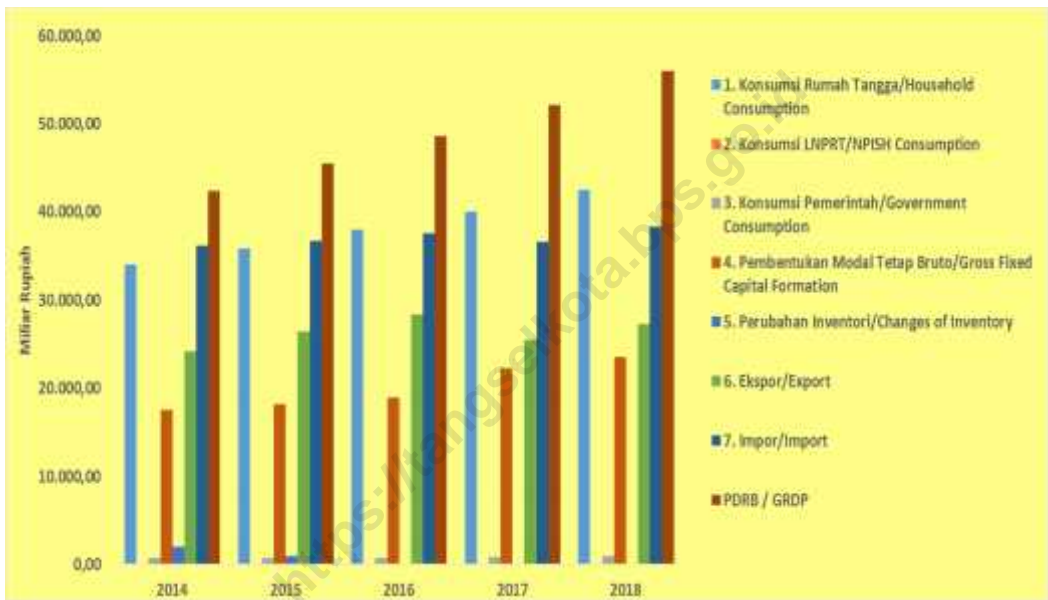
Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Tangerang Selatan Municipality 2014-2018

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(Miliar Rp/ <i>Trillion Rp</i>)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	34 007,21	35 830,28	37 945,26	40 026,10	42 451,85
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	99,88	104,75	109,00	112,95	120,15
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	720,75	751,53	785,28	821,24	900,84
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	17 530,64	18 137,15	18 948,68	22 238,35	23 501,08
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	2 017,66	982,23	41,10	35,88	39,76
6. Ekspor/ <i>Export</i>	24 189,34	26 407,28	28 296,74	25 439,59	27 272,95
7. Impor/ <i>Import</i>	36 154,02	36 727,60	37 573,07	36 573,35	38 347,92
PDRB / <i>GRDP</i>	42 411,47	45 485,61	48 552,98	52 100,77	55 938,71

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kota Tangerang Selatan meningkat, yakni sebesar 42 411,47 miliar Rupiah (2014); 45 485,61 miliar Rupiah (2015); 48 552,98 miliar Rupiah (2016); 52 100,77 miliar Rupiah (2017) dan 55 938,71 miliar Rupiah (2018). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir, yakni dari 8,05 persen pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 melambat menjadi 7,25 persen dan makin melambat di tahun 2016 menjadi 6,74 persen. Namun pada tahun 2017 dan 2018 kembali

mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 7,31 persen dan 7,37 persen.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018



Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014-2018

Figure 1. Comparing of GRDP at current price and GRDP at Constant Price 2010, Tangerang Selatan Municipality, 2014-2018



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018**

*Table 3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Tangerang
Selatan Municipality.2014-2018*

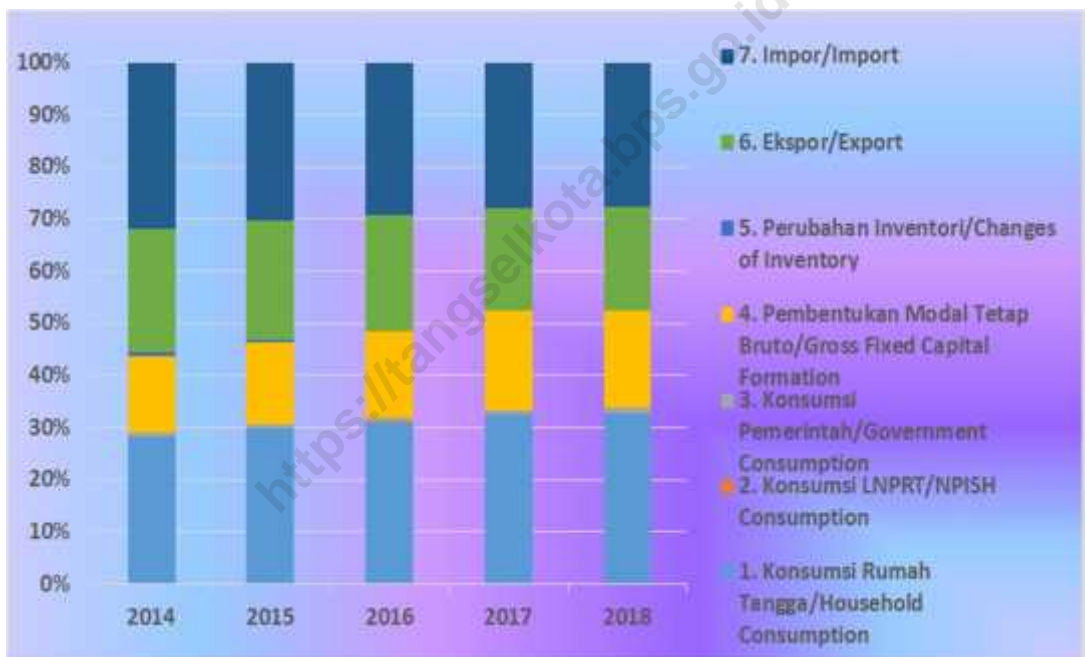
Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(%)				
	2014 (1)	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	78,46	75,29	74,98	73,43	73,13
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1,82	1,75	1,75	1,70	1,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	40,48	40,11	40,20	43,11	41,73
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	2,31	0,92	0,05	0,05	0,08
6. Ekspor/ <i>Export</i>	65,19	58,02	53,53	44,44	44,45
7. Impor/ <i>Import</i>	88,49	76,32	70,73	62,94	61,55
PDRB / <i>GRDP</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kota Tangerang Selatan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 40 s.d 43 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 44 s.d 65 persen, namun di sisi

lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 61 s.d 88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 1,70 - 1,96 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB masih relative kecil. Di sisi lain, pada tahun 2014-2018 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Kecenderungan

pada periode itu selalu menunjukkan posisi “minus”. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2014-2018 perdagangan antar wilayah menunjukkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor (dalam kondisi “defisit” atau merugi). Seperti kita ketahui bahwa Kota Tangerang Selatan kota yang bergerak di sektor Tersier (Perdagangan dan Jasa-jasa). Jadi barang-barang yang dikonsumsi sebagian besar berasal dari wilayah diluar kota Tangerang Selatan.

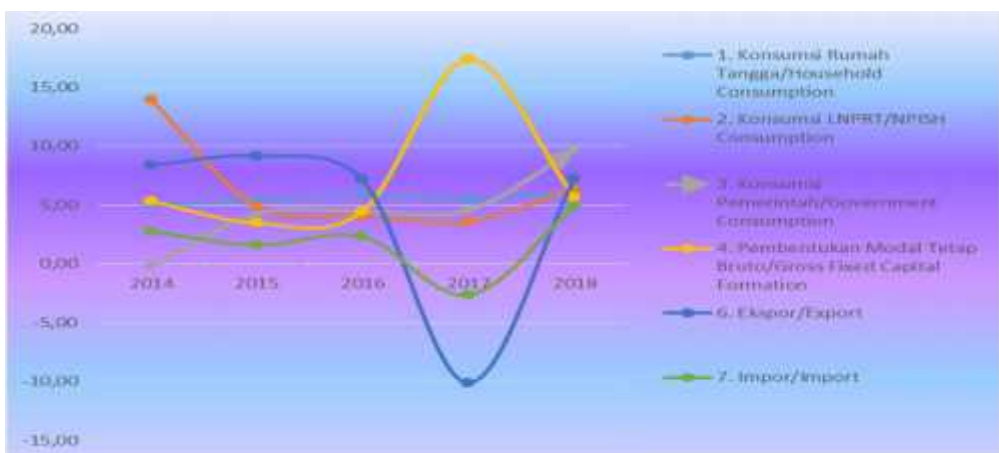
Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2014 - 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuatif, yakni sebesar 8,05 persen (2014); 7,25 persen (2015); 6,74 persen (2016); tetapi mengalami kenaikan lagi tahun 2017 dan 2018 yaitu masing-masing sebesar 7,31 persen dan 7,37 persen. Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018(%)

Table 4. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Tangerang Selatan Municipality 2014-2018(%)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	5,04	5,36	5,90	5,48	6,06
2. Konsumsi LNPRT/NPISH <i>Consumption</i>	13,98	4,88	4,06	3,62	6,37
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	(0,16)	4,27	4,49	4,58	9,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5,32	3,46	4,47	17,36	5,68
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	-11,79	-51,32	-95,82	-12,69	10,80
6. Ekspor/ <i>Export</i>	8,40	9,17	7,16	-10,10	7,21
7. Impor/ <i>Import</i>	2,77	1,59	2,30	-2,66	4,85
PDRB / <i>GRDP</i>	8,05	7,25	6,74	7,31	7,37

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2014 - 2018, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014 - 2018

Table 5. Implicit Indices of GRDP by Expenditure, Municipality Tangerang Selatan 2014-2018

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	115,53	118,17	121,13	124,64	129,60
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	112,36	119,05	124,22	128,38	132,55
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	126,51	130,89	136,75	140,85	163,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	115,62	124,38	130,05	131,70	133,58
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	57,45	52,56	73,51	103,73	144,36
6. Ekspor/ <i>Export</i>	134,95	123,57	115,96	118,69	122,61
7. Impor/ <i>Import</i>	122,56	116,85	115,40	116,93	120,75
PDRB / <i>GRDP</i>	118,07	123,64	126,26	130,41	134,49

⁶ Indeks perkembangan

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan 2014-2018

Table 6. Source of Growth of GRDP by Expenditure, Municipality Tangerang Selatan 2014-2018

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	4,16	4,30	4,65	4,29	4,66
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	(0,00)	0,07	0,07	0,07	0,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2,26	1,43	1,78	6,78	2,42
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	-0,69	-2,44	-2,07	-0,01	0,01
6. Ekspor/ <i>Export</i>	4,77	5,23	4,15	-5,88	3,52
7. Impor/ <i>Import</i>	2,48	1,35	1,86	-2,06	3,41
PDRB / <i>GRDP</i>	8,05	7,25	6,74	7,31	7,37

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan

inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Tangerang Selatan untuk periode 2014 - 2018.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Tangerang Selatan ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Tangerang Selatan maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014 - 2018 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami (peningkatan/penurunan)

signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Tangerang Selatan, 2014-2018

Table 7. Trend of Using on Final Household Consumption of MunicipalityTangerang Selatan 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/Total of Household Consumption					
a. ADHB / Current Prices (Miliar Rp)	39.288,84	42.341,14	45.963,98	49.887,80	55.016,28
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Miliar Rp)	34.007,21	35.830,28	37.945,26	40.026,10	42.451,85
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	78,46	75,29	74,98	73,43	73,13
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/ Average of per-Household consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Thousand Rp)	103.231,13	107.631,18	113.130,68	118.981,61	127.229,39
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Thousand Rp/Trillion Rp)	89.353,70	91.080,57	93.394,30	95.461,62	98.173,19
Rata-rata konsumsi per-Kapita/ Average of per-capita consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Thousand Rp)	26.315,38	27.437,07	28.839,02	30.328,79	32.432,95
b. ADHK 2013/2013 Constant Prices (Thousand Rp/Trillion Rp)	22.777,79	23.218,03	23.807,87	24.333,47	25.026,03
<u>Pertumbuhan/Growth[1]</u>					
a. Total konsumsi Ruta/ Total of Household Consumption	5,04	5,36	5,90	5,48	6,06
b. Konsumsi Per Ruta	2,37	1,93	2,54	2,21	2,84
b. Perkapita/Per capita	2,37	1,93	2,54	2,21	2,85
Jumlah Ruta	380.591	393.391	406.291	419.290	432.418
Jumlah penduduk/Number of population (000 orang/person)	1492999	1543209	1593812	1644899	1696308

Selama periode 2014 - 2018 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB menurun, yaitu 78,46 (2014); 75,29 persen (2015); 74,98 persen (2016); 73,43 persen (2017) dan 73,13 persen (2018). Posisi tertinggi terjadi

pada tahun 2014 sebesar 78,46 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 73,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga mulai berkurang peranannya terhadap total PDRB di Kota Tangerang Selatan. Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014, setiap rumahtangga di Kota Tangerang Selatan menghabiskan dana sekitar 103,23 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 107,63 juta Rupiah (2015); 113,13 juta Rupiah (2016); 118,98 juta Rupiah (2017); dan 127,23 juta Rupiah (2018). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 7,67 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 2,84 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk

meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 1 s.d 2 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Kota Tangerang Selatan 2014-2018 (%)
Table 8. Structure of Household Final Consumption Expenditure, Municipality Tangerang Selatan 2014 – 2018 (%)

Kelompok Konsumsi/Consumption group	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	25,81	25,27	24,89	24,48	24,00
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	3,75	3,72	3,73	3,60	3,53
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	16,79	17,22	17,07	17,01	17,18
d. Kesehatan & Pendidikan/ <i>Health and education</i>	8,24	8,33	8,30	8,22	8,08
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	27,71	27,53	27,88	28,53	29,29
f. Hotel & Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	12,35	12,34	12,54	12,52	12,21
g. Lainnya/ <i>Miscellaneous goods and services</i>	5,35	5,58	5,59	5,65	5,70
Total Konsumsi / <i>Total of consumption</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2014 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 5,04 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 5,36 persen (2015); 5,90 persen (2016); 5,48 persen (2017) dan 6,06 persen (2018). Sementara itu rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 2,37 persen (2014); 1,93 persen (2015); 2,54 persen (2016); 2,21 persen (2017) dan 2,85 persen (2018). Dari data

tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 3 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan 2014-2018(%)
Table 9. Implicit Growth (Price Indices) of Household Final Consumption Expenditure, Municipality Tangerang Selatan 2014 – 2018⁷(%)

	2014	2015	2016	2017	2018
Kelompok Konsumsi/Consumption group					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	2,07	2,21	2,07	2,92	3,34
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	-2,23	1,65	3,30	1,10	3,16
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	0,57	5,38	2,49	3,25	5,34
d. Kesehatan & Pendidikan/ <i>Health and education</i>	-4,04	2,77	2,89	3,75	2,16
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	1,17	-0,10	2,10	3,31	4,85
f. Hotel & Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	7,57	2,59	2,97	1,29	2,65
g. Lainnya/ <i>Miscellaneous goods and services</i>	-0,93	4,61	4,31	3,18	4,56
Total Konsumsi /Total of consumption	1,39	2,29	2,51	2,89	3,98

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan perubahan harga setiap tahunnya untuk masing-

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,98 persen. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman dan rokok sebesar 1,39 persen (2014), 2,29 persen (2015), 2,51 persen (2016), dan 2,89 persen (2017).

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga (LNPRT) peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan yang tidak pernah lebih dari 1 persen selama periode tahun 2013-2017.

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT
Kota Tangerang Selatan 2014-2018**

Table 10. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Tangerang Selatan Municipality 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT	112,22	124,70	135,40	145,00	159,26
a. ADHB (Miliar Rp)					
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	99,88	104,75	109,00	112,95	120,15
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21
Pertumbuhan (ADHK 2010)	13,98	4,88	4,06	3,62	6,37

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2014 konsumsi LNPRT sebesar 112,22 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 124,70 miliar rupiah (2015), 135,40 miliar rupiah (2016), 145,00 miliar rupiah (2017) dan 159,26 miliar rupiah (2018). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2014 juga berturut-turut adalah 13,98 persen (2014), 4,88 persen (2015), 4,06 persen (2016), 3,62 persen (2017) dan 6,37 persen (2018). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 karena adanya persiapan pemilihan Walikota Tangerang Selatan tahun 2015.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarmunicipality*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2014-2018
Table 11. Trend of Government Final Consumption Expenditure, Tangerang Selatan Municipality 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	911,82	983,69	1 073,85	1 156,73	1 474,08
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	720,75	751,53	785,28	821,24	900,15
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)					
	1,82	1,75	1,75	1,70	1,96
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	610,73	637,43	673,76	703,22	868,99
b. ADHK 2010	482,75	486,99	492,70	499,27	531,06
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	173,94	168,61	188,07	230,47	293,70
b. ADHK 2010	137,49	128,82	137,53	163,63	179,48
Pertumbuhan[1]					
a. Total konsumsi pemerintah	0,43	7,88	9,17	7,72	27,44
b. Konsumsi perkapita	-2,90	4,37	5,70	4,37	23,57
c. Konsumsi per-pegawai pemerintah	-1,40	-6,31	6,76	18,98	9,69
Jumlah Pegawai Pemerintah[2]					
	5 242	5 834	5 710	5 019	5 019
Jumlah penduduk (orang)	1 492 999	1 543 209	1 593 812	1 644 899	1 696 308

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 911,82 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 983,69 miliar rupiah (2015), 1 073,85 miliar rupiah

(2016), 1 156,73 miliar rupiah (2017) dan 1 474,08 miliar rupiah (2018). Tetapi untuk konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 720,75 miliar rupiah tahun 2014 kemudian meningkat menjadi 751,53 miliar rupiah tahun 2015, naik lagi menjadi 785,28 miliar rupiah tahun 2016, dan menjadi 821,24 miliar rupiah tahun 2017 dan 900,15 miliar rupiah tahun 2018. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara umum telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi, dari 1,82 persen (tahun 2014) hingga mencapai 1,96 persen (tahun 2018). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 1,70 persen sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017 telah terjadi pengalihan status pegawai terutama pegawai dinas pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) diambil alih oleh pemerintahan provinsi.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani

penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 610,73 ribu rupiah, setiap tahun selalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 mencapai 868,99 ribu rupiah.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 482,75 ribu rupiah (2014); 486,99 ribu rupiah (2015); 492,70 ribu rupiah (2016); 499,27 ribu rupiah (2017) dan 531,06 ribu rupiah (2018). Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar -2,90 persen (2014). Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu 4,37 persen (2015); 5,70 persen (2016); 4,37 persen (2017) dan 23,57 persen (2018).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 173,94 ribu rupiah; 168,61 ribu rupiah (2015); 188,07 ribu rupiah (2016); 230,47 ribu rupiah (2017) dan 293,70 ribu rupiah (2018).

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 137,49 ribu rupiah, kemudian pada

tahun-tahun berikutnya masing-masing 128,82 ribu rupiah (2015); 138,84 ribu rupiah (2016) dan 166,77 ribu rupiah (2017).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan fluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010), sejalan juga jumlah pegawai pemerintah yang mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2014 s.d 2018 jumlah pegawai pemerintah terus mengalami fluktuasi dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 5.242 orang (2014); 5.834 orang (2015); 5.710 orang (2016); 5.019 orang (2017) dan 5.019 orang (2018).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan secara keseluruhan tetapi mengalami fluktuasi bila dilihat dari rata-ratanya (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2018 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 9,17 persen dan 27,44 persen; untuk konsumsi per-kapita 5,70 persen tahun 2016 dan 23,57 persen tahun 2018; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 yaitu 18,98 persen dan 9,69 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selama periode 2014-2018, nilai PMTB mengalami peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada tabel 12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014 - 2018 menunjukkan adanya peningkatan kecuali di tahun 2015 dan 2018, yaitu dari 5,32 persen (2014) melambat menjadi 3,46 persen (2015), kemudian meningkat kembali di tahun 2016 menjadi 4,47 persen, dan meningkat cukup signifikan di tahun 2017 menjadi

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

17,36 persen dan kembali melambat di tahun 2018 menjadi 5,68 persen. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014 - 2018 berfluktuasi dari 5,32 persen (2014) menjadi 5,68 persen (2018), sementara di tahun lainnya masing-masing 3,46 persen(2015); 4,47 persen(2016); 17,36 persen(2017); dan 5,68 persen(2018).

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB mengalami fluktuasi selama periode 2014 - 2018 tetapi ada kenaikan tahun 2017 (tabel 12). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan pada tahun 2014 sebesar 5,72 persen. Kemudian pada tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 3,51 persen, kemudian meningkat lagi pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing sebesar 4,85 persen dan 17,43 persen, namun di tahun 2018 kembali melambat menjadi 5,37 persen.

Sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang fluktuatif juga. Pada tahun 2014 sub komponen non bangunan tumbuh sebesar 0,03 persen, kemudian di tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,75 persen. Kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami perlambatan menjadi -0,82 persen dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 yaitu masing-masing sebesar 16,38 persen dan 10,36 persen.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2014-2018 pertumbuhan PMTB terus mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai besaran 17,36 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 3,46 persen.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tangerang Selatan 2014-2018
Table 12. Trend and Structure of GFCF, Municipality Tangerang Selatan 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	20 268,32	22 558,17	24 642,68	29 287,90	31 392,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	17 530,64	18 137,15	18 948,68	22 238,35	23 501,08
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	40,48	40,11	40,20	43,11	41,73
Struktur PMTB [1]					
a. Bangunan (Miliar Rp)	18 660,16	20 805,97	22 837,49	27 151,32	28 894,12
(%)	92,07	92,23	92,67	92,70	92,04
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	1 608,16	1 752,20	1 805,19	2 136,58	2 498,44
(%)	7,93	7,77	7,33	7,30	7,96
Total PMTB	20 268,32	22 558,17	24 642,68	29 287,90	31 392,56
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan[2] (%)					
a. Bangunan	5,72	3,51	4,85	17,43	5,37
b. Non Bangunan	0,03	2,75	-0,82	16,38	10,36
Total PMTB	5,32	3,46	4,47	17,36	5,68

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau

negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Tangerang Selatan 2014-2018

Table 13. Trend and Structure of Changes in Inventories, Municipality Tangerang Selatan 2014 – 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 159,11	516,28	30,21	37,22	57,40
b. ADHK 2013 (Miliar Rp)	2 017,66	982,23	41,10	35,88	39,76
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	2,31	0,92	0,05	0,05	0,08

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen

inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2014 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 1 159,11 miliar rupiah, yang kemudian mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yaitu sebesar 516,28 miliar rupiah tahun 2015, 30,21 miliar rupiah tahun 2016, 37,22 miliar rupiah tahun 2017 dan sedikit mengalami peningkatan tahun 2018 menjadi 57,40 miliar rupiah.

Bila dilihat perubahannya atas dasar harga konstan 2010, perubahan inventori dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami penurunan, dengan nilai sebesar 2 017,66 miliar rupiah (2014), 982,23 miliar rupiah (2015), 41,10 miliar rupiah (2016), 35,88 miliar rupiah (2017) dan 39,76 miliar rupiah (2018).

Proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Tangerang Selatan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, proporsi perubahan inventori adalah 2,31 persen, selanjutnya 0,92 persen (2015), 0,05 persen (2016 dan 2017), dan 0,08 persen (2018).

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Tangerang Selatan, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di

wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya

Tabel 14. Perkembangan Ekspor Kota Tangerang Selatan 2014-2018
Table 14. Trend of Export, Municipality Tangerang Selatan, 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor	32 644,70	32 630,99	32 812,94	30 193,57	33 439,91
a. ADHB (Miliar Rp)					
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	24 189,34	26 407,28	28 296,74	25 439,59	27 272,95
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	65,19	58,02	53,53	44,44	44,45
Pertumbuhan ⁹	8,40	9,17	7,16	-10,10	7,21

Secara total, dalam kurun waktu 2014-2018 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2014 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 32 644,70 miliar rupiah menurun menjadi sebesar 32 630,99 miliar rupiah pada tahun 2015, kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2016 yaitu sebesar 28 296,74 miliar rupiah kemudian pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 25 439,59 miliar rupiah dan kembali meningkat di tahun 2018

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2013

menjadi 27 272,95 miliar rupiah. Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 cenderung menunjukkan arah pertumbuhan yang hampir sama, yaitu cenderung berfluktuasi dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 24 189,34 miliar rupiah (2014); 26 407,28 miliar rupiah (2015); 28 296,74 miliar rupiah (2016); dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu sebesar 25 439,59 miliar rupiah, kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 27 272,95 miliar rupiah. Sementara itu, pada periode 2014 s.d 2018, proporsi dalam PDRB justru cenderung menurun dari 65,19 persen pada tahun 2014 menjadi 44,45 persen di tahun 2018.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2014 dan 2015, dengan masing-masing tahun mencapai 8,40 persen dan 9,17 persen. Walaupun demikian pertumbuhan ekspor sempat mengalami kontraksi di tahun 2017 yaitu sebesar -10,10 persen. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 8,40 persen (2014); naik menjadi 9,17 persen (2015.); 7,16 persen(2016); dan mengalami kontraksi menjadi -10,10 persen(2017), kemudian meningkat kembali pada 2018 menjadi 7,21 persen.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk

yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Tangerang Selatan. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Tangerang Selatan di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Tangerang Selatan ... terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kota Tangerang Selatan lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kota Tangerang Selatan berfluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2014 s.d 2018. Pada tahun 2014 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai

44 310,89 miliar rupiah, kemudian menurun menjadi 42 917,57 di tahun 2015, kemudian meningkat kembali menjadi 43 358,27 miliar rupiah pada tahun 2016, lalu turun kembali menjadi 42 764,66 miliar rupiah tahun 2017 dan meningkat cukup tinggi menjadi 46 304,95 miliar rupiah tahun 2018. Sebaliknya bila dilihat dari proporsinya terhadap pembentukan PDRB kota Tangerang Selatan mengalami penurunan tiap tahun nya dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Pada tahun 2014 impor barang dan jasa proporsinya sebesar 88,49 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 76,32 persen (2015); 70,73 persen (2016); 62,94 persen (2017) dan 61,55 persen (2018).

**Tabel 15. Perkembangan Impor
Kota Tangerang Selatan 2014-2018**
*Table 15. Trend of Import, Municipality Tangerang Selatan
2014 – 2018*

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor	44 310,89	42 917,57	43 358,27	42 764,66	46 304,95
a. ADHB (Miliar Rp)					
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	36 154,02	36 727,60	37 573,07	36 573,35	38 347,92
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	88,49	76,32	70,73	62,94	61,55
Pertumbuhan ¹⁰	2,77	1,59	2,30	-2,66	4,85

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2013

<https://tangselkota.bps.go.id>

IV BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
PENGELUARAN KOTA TANGERANG
SELATAN
2014 - 2018

<https://tangselkota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Tangerang Selatan di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB per-kapita Kota Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 16), seiring dengan kenaikan

jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Banten rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Namun demikian, pertumbuhan per-kapita secara “riil” cenderung melambat selama periode 2014-2018, dari sebesar 8,05 persen di tahun 2014 menjadi sebesar 7,37 persen tahun 2018. Di lain pihak, pertumbuhan jumlah penduduk masih stabil rata-rata pada kisaran 3 persen setiap tahun. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja menunjukkan pertumbuhan secara “riil” tetapi juga menunjukkan kualitas ekonomi Tangerang Selatan.

**Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kota Tangerang Selatan 2014-2018**
*Table 16. Gross Domestic Regional Bruto and per capita GRDP, Municipality
Tangerang Selatan 2014 – 2018*

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)	50 074,11	56 237,40	61 300,80	67 943,56	75 234,55
- ADHB					
- ADHK 2010	42 411,47	45 485,61	48 552,98	52 100,77	55 938,71
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)	33,54	36,44	38,46	41,31	44,35
- ADHB					
- ADHK 2010	28,41	29,47	30,46	31,67	32,98
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,46	3,76	3,35	3,97	4,11
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	1 493,00	1 543,21	1 593,81	1 644,90	1 696,31
Pertumbuhan	8,05	7,25	6,74	7,31	7,37

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP EKSPOR

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut

mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam PDRB Tangerang Selatan (di atas 70 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dipasarkan di wilayah Tangerang Selatan sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Di dalamnya termasuk pula produk yang berasal dari impor.

Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan 2014-2018

Table 17. Total Proporsion of Final Consumption Expenditure to GRDP

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	39 288,84	42 341,14	45 963,98	49 887,80	55 016,28
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	32 644,70	32 630,99	32 812,94	30 193,57	33 493,91
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,20	1,30	1,40	1,65	1,65

Data di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2014 hingga 2018 produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1 kali dari yang dieskpor. Hal ini berarti bahwa sebagian penyediaan (*supply*)

domestik tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, sehingga harus dipenuhi melalui impor. Penurunan rasio yang terjadi pada tahun berikutnya lebih disebabkan karena perlambatan nilai konsumsi rumah tangga, sementara ekspor bertambah lebih besar dari kenaikan konsumsi rumah tangga.

Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurunt. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang terjadi juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat sedangkan pertumbuhan ekspor mengalami perlambatan sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 tetapi meningkat lagi tahun 2018.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Banten digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB terus menurun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu masing-masing sebesar 1,94 pada tahun 2014, kemudian turun menjadi 1,88 di tahun 2015, turun menjadi 1,87 tahun 2016 dan terus turun menjadi 1,70 pada tahun 2017 dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 1,75 pada tahun 2018.

Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB

Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	39 288,84	42 341,14	45 963,98	49 887,80	55 016,28
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	20 268,32	22 558,17	24 642,68	29 287,90	31 392,57
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,94	1,88	1,87	1,70	1,75

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang dipasarkan di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 71 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang semakin meningkat.

**Tabel 19. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kota Tangerang Selatan, Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	39 288,84	42 341,14	45 963,98	49 887,80	55 016,28
b. LNPRT	112,22	124,70	135,41	145,00	159,26
c. Pemerintah	911,82	983,69	1 073,85	1 156,73	1 474,08
Jumlah	40 312,87	43 449,53	47 173,24	51 189,53	56 649,62
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	50 074,11	56 237,40	61 300,80	67 943,56	75 234,55
Proporsi	80,51	77,26	76,95	75,34	75,30

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk

menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Kota Tangerang Selatan
2014 – 2018**

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	32 644,70	32 630,99	32 812,94	30 193,57	33 439,91
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	20 268,32	22 558,17	24 642,68	29 287,90	31 392,56
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,61	1,45	1,33	1,03	1,07

Pada tahun 2014-2018 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB (tabel 20). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor. Hal ini terlihat dari tabel 20 bahwa mulai tahun 2015 rasio ekspor terhadap PMTB terus mengalami penurunan yaitu 1,45 (2015); 1,33 (2016); 1,03 (2017) dan 1,07 (2018).

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP TOTAL IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain. Jika rasionya kecil berarti menunjukkan ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor Kota Tangerang Selatan
Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	50 074,11	56 237,40	61 300,80	67 943,56	75 234,55
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	44 310,89	42 917,57	43 358,27	42 764,66	46 304,95
Rasio PDRB terhadap Impor	0,88	0,76	0,71	0,63	0,62

Rasio PDRB terhadap impor pada periode tahun 2014 - 2018 menunjukkan perlambatan dari 0,88 (2014) menjadi 0,62 (2018). Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2018 (0,88). Rasio PDRB terhadap impor Kota Tangerang Selatan terlihat masih relatif kecil yang menunjukkan

ketergantungan perekonomian Kota Tangerang Selatan kepada impor masih cukup tinggi.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kota Tangerang Selatan, 2014–2018**

(Miliar Rp)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB) (%)	50 074,11 (53,05)	56 237,40 (56,72)	61 300,80 (58,57)	67 943,56 (61,37)	75 234,55 (61,90)
Total Impor ADHB (%)	44 310,89 (46,95)	42 917,57 (43,28)	43 358,27 (41,43)	42 764,66 (38,63)	46 304,95 (38,10)
<u>Total Permintaan Akhir</u> ¹¹	94 385,01	99 154,97	104 659,07	110 708,23	121 539,49
(%)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

¹¹ Termasuk diskrepansi statistik

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan persentase sekitar 38-47 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 53-62 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 94.385,01 miliar rupiah (2014) menjadi sebesar 121.539,49 miliar rupiah (2018).

Di sisi lain, “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 50.074,11 miliar rupiah (2014); 56.237,40 miliar rupiah (2015); 61.300,80 miliar rupiah (2016); 67.943,56 miliar rupiah (2017) dan 75.234,55 miliar rupiah tahun 2018. Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 44.310,89 miliar rupiah (2014); 42.917,57 miliar rupiah (2015); 43.358,27 miliar rupiah (2016); 42.764,66 miliar rupiah (2017) dan 46.304,95 miliar rupiah tahun 2018.

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "**Ekspor Neto**", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai total ekspor terhadap total impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya

ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2014 - 2018, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Tangerang Selatan dengan provinsi lain dan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Banten selalu dalam posisi defisit. Nilai total impor yang lebih besar dari total ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar.

Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kota Tangerang Selatan, 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	32 644,70	32 630,99	32 812,94	30 193,57	33 439,91
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	44 310,89	42 917,57	43 358,27	42 764,66	46 304,95
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	(11 666,19)	(10 286,58)	(10 545,33)	(12 571,09)	(12 865,04)
Rasio ekspor thd Impor	0,74	0,76	0,76	0,71	0,72

Keterangan: Tanda dalam kurung menunjukkan minus (-)

Total defisit perdagangan Kota Tangerang Selatan yang terjadi antara tahun 2014 sampai dengan 2018 tercatat masing-masing sebesar 11.666,19 miliar rupiah (2014); 10.286,58 miliar rupiah (2015); 10.545,33

miliar rupiah (2016); 12.571,09 miliar rupiah (2017) dan 12.865,04 miliar rupiah (2018).

Sementara rasio total ekspor terhadap total impor cenderung stabil dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 sebesar 0,74, kemudian 0,76 pada tahun 2015 dan 2016, 0,71 tahun 2017 dan 0,72 pada tahun 2018.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio, Kota Tangerang Selatan Municipality of Tangerang Selatan 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010 (miliar rupiah)	42 411,47	45 485,61	48 552,98	52 100,77	55 938,71
Perubahan (miliar rupiah)	3 159,93	3 074,15	3 067,37	3 547,78	3 837,95
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	17 530,64	18 137,15	18 948,68	22 238,35	23 501,08
ICOR	5,55	5,90	6,18	6,27	6,12

Data di atas menunjukkan besaran ICOR berfluktuasi pada kisaran nilai 5-6 . Pada tahun 2014 ICOR Tangerang Selatan sebesar 5,55 naik menjadi 5,90 di tahun 2014. Pada tahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi 6,18 dan 6,27 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 6,12 di tahun 2018. Dari besaran ICOR 2018 sebesar 6,12 tersebut dapat dikatakan bahwa

di Kota Tangerang Selatan untuk setiap peningkatan output sebesar 1 miliar rupiah diperlukan penambahan kapital sebesar 6,12 miliar rupiah.

<https://tangselkota.bps.go.id>

<https://tangselkota.bps.go.id>

V BAB V
PENUTUP

<https://tangselkota.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2014 s.d 2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Tangerang Selatan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014 s.d 2018, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter

disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Tangerang Selatan terhadap ekonomi luar daerah.

VI *LAMPIRAN*

<https://tangselkota.bps.go.id>

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan

Komponen	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	39.288.837,41	42.341.136,30	45.963.977,22	49.887.801,12	55.016.279,58
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	10.139.920,80	10.698.388,34	11.440.859,99	12.213.533,44	13.201.651,86
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.472.475,09	1.576.472,13	1.715.289,01	1.793.765,95	1.942.412,89
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.598.350,47	7.292.318,22	7.846.211,12	8.486.230,44	9.453.451,16
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3.235.905,18	3.528.616,94	3.816.937,02	4.100.434,16	4.447.645,53
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10.887.278,71	11.657.203,28	12.812.568,15	14.232.931,87	16.116.971,81
1.f. Hotel dan Restoran	4.851.145,93	5.224.207,97	5.762.759,07	6.244.079,75	6.716.389,16
1.g. Lainnya	2.103.761,25	2.363.929,41	2.569.352,86	2.816.825,50	3.137.757,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112.219,71	124.704,78	135.405,57	145.002,18	159.258,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	911.817,37	983.689,46	1.073.853,06	1.156.726,60	1.474.078,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	20.268.315,26	22.558.170,25	24.642.679,65	29.287.903,25	31.392.565,57
4.a. Bangunan	18.660.163,54	20.805.965,39	22.837.494,17	27.151.323,11	28.894.120,69
4.b. Non-Bangunan	1.608.151,73	1.752.204,86	1.805.185,48	2.136.580,14	2.498.444,88
5. Perubahan Inventori	1.159.114,52	516.279,38	30.212,09	37.224,18	57.401,80
6. Ekspor	32.644.700,89	32.630.989,16	32.812.937,66	30.193.567,76	33.439.907,73
7. Impor	44.310.894,61	42.917.571,30	43.358.268,16	42.764.661,53	46.304.946,04
PDRB	50.074.110,56	56.237.398,04	61.300.797,10	67.943.563,56	75.234.545,71

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tangerang Selatan

Komponen	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	34.007.214,34	35.830.277,17	37.945.261,55	40.026.100,99	42.451.853,65
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8.700.415,95	8.980.954,16	9.409.585,71	9.760.491,03	10.209.236,69
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.295.194,92	1.364.099,29	1.436.805,78	1.486.154,31	1.559.958,84
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.030.000,31	6.323.864,70	6.638.974,52	6.954.385,26	7.354.446,51
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2.768.419,95	2.937.486,71	3.088.388,46	3.197.874,32	3.395.184,14
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9.365.880,89	10.038.691,00	10.806.245,11	11.619.932,81	12.549.938,71
1.f. Hotel dan Restoran	3.911.768,12	4.106.183,00	4.398.943,24	4.705.549,58	4.930.966,61
1.g. Lainnya	1.935.534,20	2.078.998,31	2.166.318,74	2.301.713,66	2.452.122,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	99.877,13	104.748,94	109.004,36	112.950,31	120.149,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	720.750,61	751.534,33	785.278,22	821.243,96	900.836,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	17.530.641,24	18.137.149,73	18.948.675,20	22.238.350,67	23.501.077,19
4.a. Bangunan	16.368.224,35	16.942.749,02	17.764.094,54	20.859.720,19	21.979.638,27
4.b. Non-Bangunan	1.162.416,89	1.194.400,71	1.184.580,66	1.378.630,48	1.521.438,92
5. Perubahan Inventori	2.017.657,01	982.227,06	41.100,06	35.884,74	39.762,06
6. Ekspor	24.189.342,86	26.407.277,78	28.296.736,43	25.439.586,17	27.272.951,53
7. Impor	36.154.016,06	36.727.601,38	37.573.071,93	36.573.349,70	38.347.917,99
PDRB	42.411.467,14	45.485.613,63	48.552.983,88	52.100.767,14	55.938.712,43

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Tangerang Selatan

Komponen	2014	2015	2016	2017 [*]	2018 ^{**}
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	78,46	75,29	74,98	73,43	73,13
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	20,25	19,02	18,66	17,98	17,55
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,94	2,80	2,80	2,64	2,58
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,18	12,97	12,80	12,49	12,57
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,46	6,27	6,23	6,04	5,91
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	21,74	20,73	20,90	20,95	21,42
1.f. Hotel dan Restoran	9,69	9,29	9,40	9,19	8,93
1.g. Lainnya	4,20	4,20	4,19	4,15	4,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,82	1,75	1,75	1,70	1,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	40,48	40,11	40,20	43,11	41,73
4.a. Bangunan	37,27	37,00	37,25	39,96	38,41
4.b. Non-Bangunan	3,21	3,12	2,94	3,14	3,32
5. Perubahan Inventori	2,31	0,92	0,05	0,05	0,08
6. Ekspor	65,19	58,02	53,53	44,44	44,45
7. Impor	88,49	76,32	70,73	62,94	61,55
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan

Komponen	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	80,18	78,77	78,15	76,82	75,89
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	20,51	19,74	19,38	18,73	18,25
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,05	3,00	2,96	2,85	2,79
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,22	13,90	13,67	13,35	13,15
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,53	6,46	6,36	6,14	6,07
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22,08	22,07	22,26	22,30	22,44
1.f. Hotel dan Restoran	9,22	9,03	9,06	9,03	8,81
1.g. Lainnya	4,56	4,57	4,46	4,42	4,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,70	1,65	1,62	1,58	1,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	41,33	39,87	39,03	42,68	42,01
4.a. Bangunan	38,59	37,25	36,59	40,04	39,29
4.b. Non-Bangunan	2,74	2,63	2,44	2,65	2,72
5. Perubahan Inventori	4,76	2,16	0,08	0,07	0,07
6. Ekspor	57,03	58,06	58,28	48,83	48,76
7. Impor	85,25	80,75	77,39	70,20	68,55
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kota Tangerang Selatan

Komponen	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,50	7,77	8,56	8,54	10,28
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,53	5,51	6,94	6,75	8,09
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,94	7,06	8,81	4,58	8,29
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,94	10,52	7,60	8,16	11,40
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,41	9,05	8,17	7,43	8,47
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9,56	7,07	9,91	11,09	13,24
1.f. Hotel dan Restoran	14,79	7,69	10,31	8,35	7,56
1.g. Lainnya	(6,14)	12,37	8,69	9,63	11,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	17,86	11,13	8,58	7,09	9,83
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,43	7,88	9,17	7,72	27,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	15,98	11,30	9,24	18,85	7,19
4.a. Bangunan	16,48	11,50	9,76	18,89	6,42
4.b. Non-Bangunan	10,48	8,96	3,02	18,36	16,94
5. Perubahan Inventori	(51,59)	(55,46)	(94,15)	23,21	54,21
6. Ekspor	19,38	(0,04)	0,56	(7,98)	10,75
7. Impor	8,71	(3,14)	1,03	(1,37)	8,28
PDRB	12,91	12,31	9,00	10,84	10,73

Tanda dalam kurung menunjukkan minus (-)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan

Komponen	2014	2015	2016	2017 [*]	2018 ^{**}
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,04	5,36	5,90	5,48	6,06
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,39	3,22	4,77	3,73	4,60
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,29	5,32	5,33	3,43	4,97
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,35	4,87	4,98	4,75	5,75
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,72	6,11	5,14	3,55	6,17
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,30	7,18	7,65	7,53	8,00
1.f. Hotel dan Restoran	6,71	4,97	7,13	6,97	4,79
1.g. Lainnya	(5,26)	7,41	4,20	6,25	6,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13,98	4,88	4,06	3,62	6,37
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(0,16)	4,27	4,49	4,58	9,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5,32	3,46	4,47	17,36	5,68
4.a. Bangunan	5,72	3,51	4,85	17,43	5,37
4.b. Non-Bangunan	0,03	2,75	(0,82)	16,38	10,36
5. Perubahan Inventori	(11,79)	(51,32)	(95,82)	(12,69)	10,80
6. Ekspor	8,40	9,17	7,16	(10,10)	7,21
7. Impor	2,77	1,59	2,30	(2,66)	4,85
PDRB	8,05	7,25	6,74	7,31	7,37

Tanda dalam kurung menunjukkan minus (-)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran Kota Tangerang Selatan

Komponen	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	115,53	118,17	121,13	124,64	129,60
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	116,55	119,12	121,59	125,13	129,31
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	113,69	115,57	119,38	120,70	124,52
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	109,43	115,31	118,18	122,03	128,54
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	116,89	120,12	123,59	128,22	131,00
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	116,24	116,12	118,57	122,49	128,42
1.f. Hotel dan Restoran	124,01	127,23	131,00	132,70	136,21
1.g. Lainnya	108,69	113,71	118,60	122,38	127,96
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112,36	119,05	124,22	128,38	132,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	126,51	130,89	136,75	140,85	163,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	115,62	124,38	130,05	131,70	133,58
4.a. Bangunan	114,00	122,80	128,56	130,16	131,46
4.b. Non-Bangunan	138,35	146,70	152,39	154,98	164,22
5. Perubahan Inventori	57,45	52,56	73,51	103,73	144,36
6. Ekspor	134,95	123,57	115,96	118,69	122,61
7. Impor	122,56	116,85	115,40	116,93	120,75
PDRB	118,07	123,64	126,26	130,41	134,49

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran
Kota Tangerang Selatan

Komponen	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	1,39	2,29	2,51	2,89	3,98
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,07	2,21	2,07	2,92	3,34
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	(2,23)	1,65	3,30	1,10	3,16
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,57	5,38	2,49	3,25	5,34
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	(4,04)	2,77	2,89	3,75	2,16
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,17	(0,10)	2,10	3,31	4,85
1.f. Hotel dan Restoran	7,57	2,59	2,97	1,29	2,65
1.g. Lainnya	(0,93)	4,61	4,31	3,18	4,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,40	5,96	4,34	3,35	3,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,60	3,46	4,47	3,00	16,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	10,12	7,58	4,56	1,27	1,43
4.a. Bangunan	10,18	7,72	4,69	1,25	1,00
4.b. Non-Bangunan	10,45	6,04	3,88	1,70	5,96
5. Perubahan Inventori	(45,12)	(8,51)	39,85	41,12	39,17
6. Ekspor	10,14	(8,44)	(6,16)	2,35	3,31
7. Impor	5,78	(4,66)	(1,25)	1,33	3,27
PDRB	4,50	4,72	2,12	3,29	3,13

Tanda dalam kurung menunjukkan minus (-)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 9. Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran
Kota Tangerang Selatan

Komponen	2014	2015	2016	2017 [*]	2018 ^{**}
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,16	4,30	4,65	4,29	4,66
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	0,73	0,66	0,94	0,72	0,86
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,17	0,16	0,16	0,10	0,14
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,64	0,69	0,69	0,65	0,77
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,44	0,40	0,33	0,23	0,38
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,83	1,59	1,69	1,68	1,79
1.f. Hotel dan Restoran	0,63	0,46	0,64	0,63	0,43
1.g. Lainnya	(0,27)	0,34	0,19	0,28	0,29
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(0,00)	0,07	0,07	0,07	0,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2,26	1,43	1,78	6,78	2,42
4.a. Bangunan	2,26	1,35	1,81	6,38	2,15
4.b. Non-Bangunan	0,00	0,08	(0,02)	0,40	0,27
5. Perubahan Inventori	(0,69)	(2,44)	(2,07)	(0,01)	0,01
6. Ekspor	4,77	5,23	4,15	(5,88)	3,52
7. Impor	2,48	1,35	1,86	(2,06)	3,41
PDRB	8,05	7,25	6,74	7,31	7,37

Tanda dalam kurung menunjukkan minus (-)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

***VII DAFTAR
PUSTAKA***

<https://tangselkota.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

<https://tangselkota.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— Enlighten The Nation —



*BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANGERANG SELATAN*
Jl. Raya Pahlawan Seribu-Puspitek, Kel.Kademangan
Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan
Telepon: 021-75791502
E-mail: bps3674@bps.go.id
Website: <https://tangselkota.bps.go.id>